

BAB IV

ANALISIS

A. Penetapan UMK kabupaten lampung selatan terhadap peningkatan taraf hidup buruh

Dewan pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan keanggotaannya diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan Upah Minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat propinsi atau kabupaten serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Nasional. Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, APINDO, dan serikat buruh, untuk masa kerja anggota Dewan Pengupahan tidak ditetapkan.

UUD RI No 13 Tahun 2003 pasal 88 dan pasal 89 telah dijelaskan masalah upah, upah merupakan imbalan yang harus diberikan majikan atau penguisaha kepada pekerja, upah minimum merupakan standarisasi upah yang ada diindonesia, ditetapkannya upah minimum itu berdasarkan atas kebutuhan yang layak bagi pekerja, lain halnya dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah mereka memberikan upah kepada pekerja disesuaikan dengan biaya hidup dalam batas yang sangat minimum. Oleh karena itu, setiap orang harus diberikan imbalan penuh sesuai dengan kerjanya dan tidak boleh seorang pun yang diberlakukan secara tidak adil.Maka dalm hal ini, peran pemerintah sangat penting dalam mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan supaya diantara pekerja dan pengusaha atau majikan tidak terjadi penganiayaan dan ketidak adilan.Agar tingkat upah dapat memenuhi

kebutuhan hidup pekerja secara layak, pemerintah harus menetapkan upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan kerja yang disesuaikan berdasarkan tingkat harga dan biaya hidup. Dalam penetapan upah minimum dewan pengupahan terlebih dahulu melakukan survey terhadap nilai Kebutuhan Hidup Layak, dimana Kebutuhan Hidup Layak merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan upah minimum. Berdasarkan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 13 Tahun 2012.

Survey KHL adalah survey yang dilakukan oleh dewan pengupahan terhadap item-item KHL yang disepakati dan yang mewakili kebutuhan buruh yang sebenarnya. Dengan disahkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 88 ayat 4 diamanatkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan Ekonomi. Dalam pasal 89 juga dijelaskan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan upah minimum dicapai secara bertahap. Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, maupun non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Survey KHL sebagai faktor intern yang memengaruhi kebijakan UMK sebagaimana dijelaskan diatas merupakan survey yang memperhitungkan sejumlah item-item dasar kebutuhan buruh berdasarkan survey yang dilakukan oleh dewan pengupahan pada pasar-pasar tradisional yang terdapat di wilayah tertentu.

Selain faktor kebutuhan hidup layak diatas produktifitas makro yakni perbandingan antara jumlah produk domestik bruto dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama. Karena produk domestik bruto berpengaruh terhadap besaran upah minimum hal ini dapat membantu perluasan kesempatan kerja bagi para pekerja. Kemudian dilihat dari faktor lapangan kerja, dalam hal ini dirumuskan dalam kondisi pasar kerja yakni mencari keseimbangan antara pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan, faktor lapangan kerja menjadi penting perannya bagi serikat buruh/pekerja karena serikat buruh/pekerja lebih mengutamakan kesejahteraan pekerja dan dampaknya akan mengurangi pengangguran yang terdapat dimasyarakat.

Faktor usaha yang tidak mampu (marginal) dalam hal ini berarti pemerintah berupaya untuk mendorong perluasan kesempatan dan penambahan tenaga kerja. Karena tingginya tingkat pengangguran maka hal ini akan mempengaruhi kondisi syarat-syarat kerja. Sepanjang tingkat pengangguran tinggi maka akan sulit dilakukan perbaikan syarat-syarat kerja termasuk perbaikan upah dalam pelaksanaan hubungan kerja. Hubungan antara usaha yang paling tidak mampu (marginal) dengan penetapan upah yakni jika upah minimum ditetapkan relatif maka sekalipun secara fruktual belum secara tegas dinyatakan harus mematuhi ketentuan upah minimum tetapi jika kenaikan relatif tinggi maka tenaga kerja yang bekerja di sektor akan menuntut perbaikan penghasilan ditempat kerjanya, selain itu usaha yang paling tidak mampu bagi asosiasi pengusaha indonesia sangat penting karena jika upah yang ditentukan terlalu tinggi, maka berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan.

Sebagaimana penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terdiri dari dewan pengupahan terdiri dari tiga unsur yaitu, pemerintah, APINDO, dan serikat buruh. Menurut pendapat APINDO selain KHL, kemampuan perusahaan dalam membayar upah juga sangat penting untuk dipertimbangkan, karena jangan sampai upah minimum ditetapkan bayak membuat perusahaan yang vailid atau bangkrut, sedangkan menurut serikat buruh, selain kebutuhan hidup layak, kondisi pasar tenaga kerja penting untuk diperhitungkan, karena dampaknya disini adalah jika upah minimum ditetapkan terlalu tinggi, maka pihak perusahaan yang terdapat didaerah tersebut yang memniliki nilai KHL-nya rendah tidak dapat membayar gaji karyawan, dan perusahaan akan melakukan PHK yang mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi.

Kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum sangatlah krusial dalam perumusan pengupahan. Sehingga apabila kebijakan upah minimum belum setara dengan hasil survey KHL maka upah yang layak sebagaimana ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan pasal 88 ayat 4 dan 89 dan belum terlaksana sebagaimana yang ditetapkan bahwasannya UMK haruslah sesua dengan standar KHL yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap.

Penetapan upah minimum Kabupaten mengikuti peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut dalam penetapan upah minimum dewan pengupahan harus melakukan survey KHL, dan survey dialukan dalam waktu 1 tahun 2 kali .

Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasakan senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batinnya terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia merasa terlepas dari kemiskinan yang menyiksanya dan bahaya kemiskinan yang mengancam.

Hasil interview yang telah dilakukan, mereka mengatakan bahwa penetapan UMK yang sekarang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pada dasarnya mereka harus mencari penghasilan tambahan. Namun mereka juga beranggapan bahwa hal seperti itu tidak mungkin gaji UMK dapat memenuhi semua kebutuhan mereka karena kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas. Jika dilihat dari standar kesejahteraan menurut BPS dari tingkat pendapatan saja penghasilan para buruh tersebut di bawah 6 juta perbulannya, dengan pengeluaran yang cukup tinggi. Maka dari itu mayoritas keluarga buruh tersebut mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi pengeluaran tersebut.

Indikator fasilitas tempat tinggal, kesehatan keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan indikator kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan masuk dalam golongan cukup dan tidak sampai bagus.

Apabila dilihat dari indikator kesejahteraan maka masyarakat yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan termasuk pada tingkat sejahtera tahap 3, dapat dilihat bahwa keluarga yang bersangkutan memiliki indikator yang telah ditetapkan oleh BPS. Secara keseluruhan UMK yang telah ditetapkan pemerintah dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh, meskipun ditambah dengan para keluarga yang mencari tambahan pendapatan dengan melakukan kerja sampingan.

B. Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Buruh

Perlindungan pekerja/buruh kaitannya dengan pengupahan, ketentuan penangguhan Upah Minimum kiranya perlu ditinjau kembali. Sementara itu, ketentuan dalam penetapan Upah Minimum tidak diberlakukan sebaliknya dari adanya kemungkinan penangguhan Upah Minimum yaitu ketentuan memaksa bagi Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas sangat baik namun mempunyai pekerja/ buruh yang sedikit. Tidak sedikit perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi namun dengan tenaga kerja yang sedikit hanya memberikan Upah Minimum bagi pekerja/ buruhnya dengan asumsi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Survey Kebutuhan Hidup Layak dilakukan dengan transparan dan jujur serta adil sehingga besarnya Upah Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah mengacu pada besarnya nilai Kebutuhan hidup layak tersebut. Apabila penetapan Upah Minimum diarahkan menuju pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak, perlu ditetapkan Kebutuhan Hidup Layak tersebut “harus” sudah diberlakukan.

Hal ini agar menimbulkan pandangan bagi para pekerja/ buruh bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan para pekerja/ buruh.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah dalam prinsip Ekonomi Islam berprinsipkan keadilan, kelayakan dan kebajikan. Adil dalam Ekonomi Islam berarti tidak mendzalimi dan menganiaya orang lain, kedzaliman dalam hal ini dapat dilakukan oleh pengusaha dan pekerja bahkan sebaliknya. Termasuk dalam kedzaliman pengusaha terhadap pekerja adalah mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan yang sesungguhnya, memaksa pekerja bekerja diluar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan kerja dengan semena-mena, termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja, seperti hak dalam menjalankan kewajiban beribadah, hak untuk beristirahat jika dia sakit.

Adapun kedzaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pengusaha, seperti tidak bekerja sesuai dengan jam kerja yang ditentukan, melakukan perusakan terhadap aset milik pengusaha, dan sebagainya. Karena itu Islam menghormati hak-hak orang lain.

Penetapan upah yang adil adalah berdasarkan pada hakikat dan fungsi dari tenaga kerja itu sendiri, Islam memberikan dasar dalam melaksanakan penentuan upah yang adil, yaitu supaya pihak pengusaha dalam menentukan upah berdasarkan keadilan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Islam memandang bahwa gaji buruh itu sama sekali tidak terkait dengan harga barang yang diproduksinya maupun tingkat taraf hidup suatu masyarakat. Upah yang diterima oleh seorang buruh tidak lebih dan tidak kurang hanya bergantung pada jasa yang diberikannya. Semakin tinggi jasa yang diberikannya semakin besar pula upah yang diberikan. Hal ini terkait dengan pandangan islam tentang nilai barang yang dihasilkannya yaitu bahwa nilai barang bergantung pada kegunaannya serta memperhatikan faktor kelangkaannya.

Prinsip keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya, yang artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sedangkan prinsip kelayakan dalam islam yaitu, upah yang diterima oleh pkerja dilihat dari tiga aspek sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Selain ketiga aspek tersebut kelayakan dalam islam bermakna sesuai kebutuhan pasaran, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang sebenarnya dipeoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam upah bermakna janganlah mempekerjakan seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Upah bagi pekerja/buruh adalah harga yang harus dibayarkan kepada mereka atas jasanya dalam produksi kekeayaan. Bagi perusahaan upah adalah biaya produksi yang harus dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi pendapatan mereka, sedngkan upah minimum yakni suatu standar minimum yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Penetapan upah sangatlah mengutamakan kelayakan, hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tingkktat kebutuhan hidup layak seorang pekerja dan menjadi indikator utama dalam menetapkan upah minimum. Akan tetapi hal tersebut kurang sejalan dengan konsep kelayakan dalam menetapkan upah kepada pekerja dalam pandangan ekonomi islam, sebagaimana kelayakan menurut pandangan ekonomi islam berarti cukup sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).

Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda mereka (para budak atau pelayanmu) adalah saudaramu Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara dibawah asuhannya maka haruslah diberinya makan seperti apa yang dipakainya sendiri, dan tidak membebankan kepada mereka dengan tugas yang sangat

berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membayar mereka (mengerjakannya).

Berdasarkan pemaparan diatas, diketahui bahwa penetapan upah minimum ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam sejalan dengan prinsip keadilan dan kelayakan Kebutuhan Hidup Layak(KHL). Karena dalam penetapan upah minimum ditetapkan dibawah standar hidup layak untuk pekerja lajang masih ada komponen yang belum diperhitungkan seperti dikomponen perumahan, (pembayaran listrik), penulis merasa itu harus diperhitungkan , dan dalam komponen kesehatan (sabun cuci pakaian dan sabun cuci piring) juga belum diperhitungkan, sedangkan ketiga komponen tersebut merupakan komponen pokok bagi para pekerja baik lajang maupun sudah berumah tangga.

Adapun dalam pelaksanaan survey kebutuhan hidup layak juga terdapat ketidak sesuaian antara peraturan yang telah dibuat, seperti survey kebutuhan hidup layak yang seharusnya dilakukan setiap bulan tetapi pada prakteknya hanya dilakukan dua kali dalam setahun. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian pada tahun 2015 kebutuhan hidup layak hanya dilakukan pada bulan juli dan agustus sedangkan pada tahun 2016 survey dilakukan pada bulan juni dan juli, lebih tepatnya survey dilakukan setiap akan jatuh bulan ramadhan sebelum puasa dan sebelum lebaran. Dan dalam penetapan upah minimum yang dilakukan oleh dewan pengupahan harus ada revisi karena apabila hanya memperhitungkan kebutuhan hidup pekerja lajang saja maka untuk kebutuhan hidup layak seorang yang sudah menikah jauh dari kata kelayakan karena untuk kebutuhan istri dan anaknya tidak diperhitungkan,

sedangkan kondisi pada lapangan banyak ditemukan seorang pekerja yang sudah berkeluarga.